KAFA'AH JOURNAL, 12 (1), 2022
(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)
Available online at http://kafaah.org/index.php/kafaah/index

RESILIENSI DAN AGENSI PEREMPUAN DALAM PEMULIHAN KRISIS DI PROVINSI BENGKULU

Rahmat Effendi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: rahmateffendiyessa97@gmail.com

Inayah Rohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: inayah.rohmaniyah@uin-suka.ac.id

Abstract

Women become decisive agents in building resilience and community recovery in times of crisis, as happened in Bengkulu Province. One of the serious crises that society has recently faced has occurred due to the Covid-19 pandemic. The crisis arose due to various factors and the pandemic further exacerbated the impact of the crisis, even after the pandemic. In Bengkulu Province, the declining condition of the community has contributed to the increase in the number of cases. Even so, various parties have taken the best steps to overcome the crisis with various approaches. This article reveals the mainstream gender issues in Bengkulu Province society, especially during the pandemic, and how women seek solutions. This research is based on a literature study using the descriptive-analytical method. The theoretical framework used is gender and agency theory to see emerging gender issues and women's agency in tackling the complexity of the crisis in Bengkulu Province. This study shows that women's agency is seen in the realm of discourse and real action in society and contributes to building women's resilience in facing times of crisis. Through various discussions, scientific activities, and socialization in the context of educating women, they show their agency and resilience. Women's agencies are also seen in the form of real action in the community. This study provides recommendations to various parties in Bengkulu Province that to resolve the current and future crises, it is necessary to involve women and men in an egalitarian manner by upholding equal rights and obligations.

Keywords: Resilience, Women's Agency, Discourse, Real Action, Crisis.

Abstrak

Perempuan menjadi agen penentu dalam membangun resiliensi dan pemulihan masyarakat di saat krisis, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Salah satu krisis serius yang belum lama ini dihadapi masyarakat terjadi karena pandemi Covid-19. Krisis muncul disebabkan berbagai faktor dan pandemi semakin memperparah dampak krisis, bahkan pasca pandemi. Di Provinsi Bengkulu, kondisi masyarakat yang semakin menurun, turut menyumbang peningkatan jumlah kasus yang terjadi. Meskipun begitu, berbagai pihak telah mengambil langkah terbaik guna menanggulangi krisis dengan berbagai pendekatan. Artikel ini mengungkapkan isu gender yang *mainstream* di masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya selama pandemi berlangsung, dan bagaimana perempuan mencari penyelesaian. Penelitian ini berbasis studi pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Kerangka teori yang digunakan adalah teori gender dan agensi untuk melihat isu gender yang muncul dan agensi perempuan dalam menanggulangi kompleksitas krisis di Provinsi Bengkulu. Kajian ini menunjukkan bahwa agensi perempuan terlihat dalam ranah wacana maupun aksi nyata di masyarakat dan berkontribusi membangun resiliensi perempuan dalam menghadapi masa krisis. Melalui berbagai diskusi, kegiatan ilmiah dan sosialisasi dalam rangka edukasi para perempuan menunjukkan agensi dan resiliensinya.

Kafa'ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)

Agensi perempuan juga terlihat dalam bentuk aksi nyata di masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak di Provinsi Bengkulu bahwa untuk menyelesaikan krisis yang terjadi pada saat sekarang dan akan datang, perlu melibatkan perempuan dan laki-laki secara egaliter dengan menjunjung persamaan hak dan kewajiban.

Kata Kunci: Resiliensi, Agensi Perempuan, Wacana, Aksi Nyata, Krisis.

PENDAHULUAN

Perempuan terbukti menjadi agen penentu dalam membangun resiliensi dan pemulihan masyarakat di saat krisis. Salah satu krisis serius yang belum lama ini dihadapi masyarakat terjadi dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Provinsi Bengkulu. Momentum pandemi yang terjadi di sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menjadikan krisis kemanusian berbasis gender tidak terelakkan di Provinsi Bengkulu. Data yang ditunjukkan dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi sebanyak 152 kasus dan tahun 2021 terjadi sebanyak 198 kasus (SIMFONI-PPA, 2021). Melihat data tersebut terjadi peningkatan jumlah kasus sebesar 46 kasus dari tahun 2020 ke 2021 di Provinsi Bengkulu. Bahkan untuk tahun 2020, Provinsi Bengkulu berada dalam urutan ke-4 angka kekerasan seksual tertinggi di Pulau Sumatera (rakyatbengkulu.com, 2020). Dari data kasus tersebut yang menjadi korban adalah didominasi oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Pandemi yang berakibat pada berhentinya secara sementara sektor-sektor kehidupan menjadi penyumbang peningkatan kasus kekerasan gender.

Studi tentang peran dan agensi perempuan dalam situasi krisis telah banyak dilakukan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Titik Nurhayati dan Rizqon Halal Syah Aji yang menurut mereka berdua perempuan didorong untuk melawan pandemi dengan gerakan emansipasi mereka (Nurhayati & Aji, 2020). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Dewi, bahwa dengan adanya pandemi ini, isu gender harus digaungkan guna menunjukkan kualitas dan kekuatan perempuan dalam hal kepemimpinan dan kemanusiaan (Dewi, 2020). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh S. Nanthini dan Tamara Nair. Dalam penelitian tersebut kedua penulis menunjukkan bagaimana dampak pandemi covid-19 yang menimpa kaum perempuan. Pada dasarnya artikel tersebut turut menunjukkan krisis multidimensional yang terjadi terhadap kaum perempuan selama masa pandemi berlangsung yang melingkupi ranah internasional. Dalam krisis multidimensional tersebut, kedua penulis ingin menunjukkan bagaimana kontruksi gender yang terjadi di tengah krisis dan pandemi, disertai jalan keluar yang telah diambil dalam setiap krisis tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ini sangat berdampak bagi kaum perempuan dan anak-anak (Nanthini & Nair, 2020).

Adapula artikel yang terbit dalam kajian gender di tengah pandemi dalam, rangka menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia seperti yang ditulis oleh Kari M. Osland dan Kawan-kawan dengan judul The Impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security Agenda. Dalam artikel tersebut penulis menjelaskan bagaimana dampak yang dihadapi oleh kaum perempuan dari segi perdamaian dan keamanan dunia. Tidak pelak jika covid-19 telah menyerang seluruh dunia hingga menyebabkan terjadinya pergesekan antarnegara karena sentimen masing-masing. Perang dingin memang telah selesai. Akan tetapi pergesekan karena faktor kepentingan masih terjadi di beberapa negara dan antarlintas benua. Melalui tulisan tersebut, penulis mengutarakan bagaimana kaum perempuan dapat turut serta menjadi duta perdamaian dan keamanan dunia di tengah pandemi. Dengan menjunjung tinggi solidaritas sesama manusia memerangi pandemi yang tidak berujung (Osland dkk., 2020).

Tulisan ini disajikan untuk mengungkapkan berbagai isu gender yang kompleks yang muncul pada masa krisis pandemi di Provinsi Bengkulu. Selain itu, kajian akan difokuskan untuk membahas agensi perempuan dalam menangani krisis yang terjadi di tengah pandemi *covid*-19 di Provinsi Bengkulu. Kajian ini akan melihat peran aktif perempuan baik di level wacana maupun ranah aksi nyata, yang pada gilirannya berkontribusi membangun resiliensi para perempuan sendiri, dan juga masyarakat lebih luas. Diharapkan pula menjadi kajian yang berguna dan bernilai manfaat serta menjadi rujukan bacaan dalam studi gender atas isu-isu gender di Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berdasarkan pada data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Kajian ini melihat berbagai krisis yang terjadi di tengah pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu secara komprehensif dan integral serta mengungkapkan bagaimana agensi perempuan dalam menciptakan resiliensi di tengah keterpurukan. Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini menjadi fokus kajian karena secara umum berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada posisi ke-2 termiskin di Pulau Sumatera setelah Provinsi Aceh baik pada tahun 2020 dan 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial dan krisis multidimensional di Provinsi Bengkulu. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kriminalitas dan kejahatan terhadap perempuan juga meningkat. Isu gender ini juga diangkat karena di Provinsi Bengkulu sendiri juga marak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak (rakyatbengkulu.com, 2021). Walau dengan jumlah penduduk yang kecil ketimbang dengan provinsi lain, isu gender tetap menjadi masalah yang sama di setiap daerah di Indonesia.

Data penelitian dalam kajian ini diperoleh melalui proses studi kualitatif yang bersumber dari dokumen primer yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat melalui website masing-masing instansi. Selain itu dokumen lain yaitu laporan melalui surat kabar *online* yang diterbitkan oleh lembaga *credible* di daerah tersebut. Penelitian juga mengakomodasi gagasan dan penilai individual atas aktivitas dan persepsi masing-masing. Data sekunder terdiri dari berbagai hasil penelitian, artikel, dan sumber lain yang membahas masalah gender dan krisis di tengah pandemi terutama di provinsi Bengkulu.

Penelitian ini diawali dengan *desk review* atas data sekunder dan bahan tertulis dari studi terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan *review* atas data primer berdasarkan temuan yang ada. Data penelitian dianalisis menguti tiga tahapan analisis Huberman yaitu reduksi data, *display* data, dan verifikasi data. Data yang sudah diverifikasi dianalisis secara interpretis yang dimulai dari *restatement*, *description*, dan *interpretation* (Miles & Huberman, 1994). Aplikasi teori analisis gender dan teori feminisme Saba Mahmood akan digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Teori feminisme Saba Mahmood digunakan untuk melihat bagaimana konstruksi gender tersebut lahir dan memberikan dampak berupa gerakan feminism (Mahmood, 2005, 2015). Gerakan feminisme tersebut lahir di dalam kesenjangan yang ada di tengah masyarakat dan memberikan dampak terhadap eksistensi perempuan, baik dalam bentuk agensi dan resiliensi perempuan di tengah masyarakat. Setelah menganalisa dengan menggunakan teori pendekatan di atas, penulis akan menarik kesimpulan dari pemaparan yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender, Krisis dan Agensi Perempuan

Istilah gender muncul dalam ilmu Sosiologi yang secara definitif diartikan sebagai konstruksi social tentang perempuan dan laki-laki, dan dibedakan dengan jenis kelamin

(Rohmaniyah, 2017a). Wacana gender mulai bergema sejak abad ke-18 M. Kaum perempuan tidak ingin lagi direndahkan oleh kaum laki-laki dalam berbagai sendi kehidupan (Jalil & Aminah, 2018). Kaum laki-laki dalam bahasa lainnya yaitu *maskulin* pada abad kegelapan di Barat memandang perempuan sebagai rendahan dan sebagai barang untuk konsumsi, bukan sebagai *partner* dan sebagai individu utuh. Hak-hak kaum perempuan tidaklah diberikan kepada mereka sebagai bentuk penghargaan dan emansipasi bagi perempuan. Sebagai reaksi adanya *renaisans* dan mulainya abad pencerahan (*the englithment*), kaum perempuan mulai tergugah untuk melepas belenggu yang mengekang mereka baik secara fisik dan psikis (Stuurman, 2005, hlm. 371). Dengan adanya sebuah harapan dan tatanan dunia baru yang menempatkan posisi perempuan sama dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan. Bentuk daripada geliat ini adalah dengan lahirnya apa yang disebut dengan feminism.

Feminisme lahir sebagai gerakan dan ideologi yang pertama kali dicetuskan oleh Lady Mary Wortley dan Marquis de Condorcet (Rokhmansyah, 2016, hlm. 38). Melalui tangan dan pikiran mereka berdua menggugah paradigma kaum perempuan yang tertindas dan hanya sebagai objek eksploitasi menjadi manusia utuh dan patut didengar pendapat mereka. Dari gerakan inilah lahir istilah yang disebut dengan gender. Berbagai ideologi, gerakan, dan studi melahirkan apa yang disebut dengan istilah gender menjadi *booming* hingga abad ke-21 M. Pergerakan gender yang dipopulerkan di Eropa lambat laun menyerebak melampaui batas-batas kolonial pada masa penjajahan dan peperangan dahulu hingga era globalisasi kekinian. Istilah gender telah masuk dalam akar sejarah manusia yang dalam dengan berbagai dinamikanya (Janz & Schönpflug, 2014, hlm. 1–2). Kekuatan sejarah tersebut dapat dilihat melalui upaya kaum perempuan dalam menunjukkan eksistensinya di dunia. Gender kemudian menjadi istilah studi dan diskursus yang tidak pernah habis diperbincangkan sejak dahulu (*in the past*), sekarang (*now*), dan akan datang (*future*).

Istilah gender lahir sebagai kontruksi sosial di tengah masyarakat. Darlene M. Juschka mengartikan gender sebagai sebuah kontruksi sosial antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi budaya, agama, dan lainnya (Juschka, 2005, hlm. 229–230). Menurut Jane Pilcher dan Imelda Wheleha, mereka berdua menerjemahkan gender sebagai penghapusan dari garis pembeda antara laki-laki dan perempuan (*masculine or feminis*), lebih dari sekedar batas psikis, seksualitas, dan peran dalam kehidupan (Pilcher & Whelehan, 2004, hlm. 56). Inayah Rohmaniyah memahami gender sebagai konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi status ontologinya hingga kontruksi sosial di tengah masyarakat (Rohmaniyah, 2017a). Eka Putra Wirman memahami gender bukan hanya sekedar pemikiran dan gerakan, melainkan sebagai bentuk ideologi dan protes atas kaum patrialis yang mendominasi berbagai sendi kehidupan (Wirman, 2013, hlm. 179–180). Dengan berbagai definisi di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan memandang jenis kelamin (*sex*), baik sebagai cara pandang, pemikiran, ideologi, maupun gerakan sosial. Melainkan menjadi sebuah paradigma yang dapat berkembang guna menunjukkan eksistensi perempuan dalam kehidupan.

Gerakan yang mengusung teori gender lahir sebagai kritik terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan berbagai ketimpangan yang dialami kaum perempuan (Rohmaniyah, 2009, hlm. 218–219). Krisis yang terjadi di suatu masyarakat berimbas pada kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap harkat, martabat, dan harga diri perempuan (Karim, 2014). Berbagai teori menyebutkan bahwa tidak akan mungkin krisis terjadi tanpa adanya ketimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Paula England pada mulanya mempertanyakan bagaimana lahirnya teori gender tersebut dari segi asalnya melalui teori sosial. Bagaimana mungkin sebuah teori sosial dapat melahirkan diferensiasi atas gender dan ketidaksetaraanya (England, 1993, hlm. 3). Misalnya teori kelas sosial masyarakat Karl Marx. Bagi Marx, hubungan sosial yang terjadi di tengah masyarakat terbagi dalam kelasnya masing-masing yang tercipta di suatu masyarakat (Marx, 1973, hlm. 16). Kelas-kelas

terwujud dalam bentuk fisik yang *real* dalam kehidupan sosial. Kelas-kelas tersebut dapat berupa kelas ilmuan atau saintis, ekonom, budayawan, hingga kelas-kelas yang terendah di suatu masyarakat (Evans, 2004, hlm. 82). Pergesekan antarkelas atau dalam kelas itu sendiri dapat menimbulkan krisis sosial yang berhimpit hingga krisis gender.

Pandemi *corona virus desease-19* yang dihadapi masyarakat Indonesia telah menyebabkan berbagai pergesekan sosial dan ketimpangan masyarakat (Garnesia, 2020). Pandemi yang saat itu menjadi bayang-bayang kematian masyarakat mengharuskan mereka bekerja dari rumah (*work from home*) (Puspita, 2020). Isu gender pun tergerus dalam wacana tersebut, sehingga dalam banyak media cetak dan elektronik yang memberitakan berbagai krisis ketimpangan gender yang terjadi di tengah pandemi global ini. Khususnya di Provinsi Bengkulu tidak luput dari krisis tersebut. Berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi krisis di Provinsi Bengkulu, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, pemuka masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Akan tetapi krisis masih saja terjadi karena bukan merupakan perkara mudah untuk menghadapi dua krisis secara bersamaan. Di satu sisi, keselamatan nyawa menjadi prioritas, namun di sisi lain aspek gender yaitu keharmonisan dalam hubungan keluarga perlu dijaga. Penekanannya ada pada konstruksi gender di daerah tersebut. Perlu ada sinergi dari berbagai pihak dalam menghadapi dua bencana yang bersamaan ini.

Perempuan sebagai manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan halnya laki-laki. Oleh karenanya dalam menghadapi isu gender yang terjadi, perempuan harus menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri dan sekitarnya. Pada saat kondisi diri dan lingkungan terpuruk, perempuan haruslah bangkit demi menunjukkan agensinya. Ketika agensi tersebut dapat terwujud, maka perempuan dapat sejajar dengan laki-laki (Agustin & Putri, 2019, hlm. 12–14). Daya tahan dan tangguh dari perempuan yang dapat bertahan dan bangkit dari keterpurukan akan menjadi semangat dan pemicu terjadinya resiliensi terhadap perempuan. Resiliensi tersebut secara lambat laun akan menggugah lingkungan sekitar dan masyarakat luas bahwa perempuan dapat bangkit dengan segala daya yang dimiliki. Perempuan masih dan dapat eksis dalam kancah kehidupan dan dinamikanya.

Kompleksitas Krisis dan Isu Gender di Provinsi Bengkulu

Selama pandemi menyerang di tahun 2020 hingga 2021, setidaknya terdapat beberapa laporan tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat di Provinsi Bengkulu, bahkan di antaranya ada yang sampai ke meja hijau. Sepanjang Januari hingga September tahun 2020 terjadi 43 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 34 kasus di tahun 2019 (Feraro, 2020). Tidak hanya terhadap istri, anak-anak juga ikut terkena imbas dalam kasus tersebut. Karena anak-anak adalah anggota keluarga utama yang mengalami dan merasakan kekerasan. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat lebih dari 100 kasus selama tahun 2020 (Sulasmi, 2020). Kemudian data tersebut semakin diperparah dengan jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 25 kasus yang membuat Provinsi Bengkulu bertengger di urutan nomor 4 se-sumatera (rls, 2020). Bahkan dalam segi ekonomi, Provinsi Bengkulu berada di posisi teratas atau nomor 2 di Pulau Sumatera sebagai provinsi dengan penduduk miskin terbanyak (Badan Pusat Statistik, 2022; Rachman, 2020) Ini adalah data yang menjadi faktor utama dan alasan krisis gender terjadi di provinsi tersebut. Tidak pelak darinya, krisis sosial di masyarakat berimbas pada krisis ketidakadilan gender yang bersifat kompleks.

Melihat berbagai data tersebut, ada banyak faktor yang mendorong munculnya krisis yang kompleks. Setidaknya, berdasar data yang terjadi di Provinsi Bengkulu tersebut, hal utama yang menyebabkan terjadinya krisis gender karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor utama dari permasalahan sosial yang terjadi. Karena terjadi kesenjangan

ekonomi melalui pendapatan dan gaya hidup, menyebabkan terjadi krisis ekonomi di tengah masyarakat. Dampak dari krisis ekonomi ini adalah memengaruhi permasalahan di tengah masyarakat sehingga terjadi krisis ketidakadilan gender. Bermula dari kesulitan hidup hingga kekerasan pun terjadi. Negara dengan kebijakannya tidak atau belum dapat menjamin keberhasilan dalam mengatasi krisis yang ada. Sehingga kaum intelektual, terutama dari kalangan perempuan dan penggiat kesetaraan gender bergerak untuk menuntut hak mereka (Nicholson, 1997, hlm. 131). Untuk Provinsi Bengkulu, angka krisis dan total kasus tersebut adalah terbilang tinggi, karena sebagai provinsi yang bukan padat penduduk, hal ini merupakan prestasi terburuk. Sebelumnya jauh pada tahun 2016 yang lalu krisis ketimpangan gender terjadi pada seorang anak perempuan yang diperkosa hingga hilang nyawanya (Kompasiana.com, 2016). Sontak berita ini menjadi *trending topic* di kancah nasional hingga internasional. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun permasalahan dan krisis gender yang terjadi di suatu masyarakat dapat memicu perhatian nasional maupun dunia.

Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Provinsi Bengkulu, terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan sekitar. Kasus yang terjadi dari sektor rumah tangga terjadi karena himpitan ekonomi keluarga. Kesenjangan sosial, penghidupan yang tidak merata, dan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan di rumah tangga. Tingginya tingkat durasi interaksi di rumah, menjadikan kasus kekerasan di dalam rumah menjadi semakin meningkat. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi 104 kasus dari sektor rumah tangga, kemudian 39 kasus di tempat lainnya (SIMFONI-PPA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di sektor rumah tangga. Ditambah dengan adanya larangan keluar rumah pada gelombang pertama dan kedua pandemi menyerang. Kebutuhan akan sandang dan pangan yang mendesak, finansial keluarga yang melemah, dan timbulnya rasa tidak saling asih menyebabkan kekerasan dalam rumah yaitu keluarga inti terjadi. Korban yang paling banyak menderita atas kekerasan tersebut adalah kaum perempuan dan anak-anak. Bentuk kekerasan dan kejahatan yang dialami adalah dalam bentuk seksual sebanyak 95 kasus, psikis sebanyak 74 kasus, fisik sebanyak 40 kasus, dan penelantaran sebanyak 25 kasus (SIMFONI-PPA, 2021).

Isu gender yang paling dominan di Provinsi Bengkulu dari berbagai data di atas adalah dalam bentuk seksualitas. Kaum perempuan mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi atas harkat dan martabatnya. Menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Bengkulu, bahwa kekerasan seksual menjadi kejahatan yang dominan di Provinsi Bengkulu. Pelaku kekerasan tidak jauh dari korban, baik itu saudara maupun orang tua korban sendiri. Bahkan dalam bentuk yang berat lagi adalah korban merupakan penyandang disabilitas di saat yang bersamaan (rri.co.id, 2021b). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan terutama dari kalangan anak dan remaja, yaitu *pertama*, ketakutan untuk melapor yang diikuti dengan janji dan intimidasi. *Kedua*, adanya stimulan berupa obat-obatan dan tayangan visual. *Ketiga*, faktor perekonomian yang lemah. Keempat, relasi emosional antara pelaku dan korban. *Kelima*, hasrat seksual pelaku yang tidak tersalurkan pada tempatnya (Sarianti & Hangabei, 2021). Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kekerasan seksual menjadi marak terjadi.

Dalam bentuk yang lebih serius, kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena yang tidak kunjung berkesudahan baik dalam lingkup nasional maupun lokal. Di awal pandemi tahun 2020 jumlah kasus KDRT berjumlah 38 kasus, sedangkan tahun 2021 bertambah menjadi 48 kasus (rakyatbengkulu.com, 2021). Hal demikian terjadi karena kebijakan kerja dari rumah (*work from home*) demi mencegah peningkatan penularan virus covid-19. Selama menjalankan kebijakan tersebut, masyarakat yang harus berada di dalam rumah mengalami peningkatan stres yang berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi

karena kesulitan ekonomi dan perubahan situasi bekerja menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak kondusif (republika.co.id, 2020).

Faktor lain yang menjadikan isu gender menjadi hangat di Provinsi Bengkulu adalah karena tingginya tingkat pernikahan dini. Data per tahun 2020, selama pandemi telah terjadi 178 kasus pernikahan dini. Jumlah ini menjadikan Provinsi Bengkulu berada dalam urutan ke-10 provinsi terbanyak melaksanakan pernikahan dini (rri.co.id, 2021a). Dengan berbagai faktor seperti keagamaan, ekonomi, dan pergaulan menjadikan pernikahan tersebut terlaksana. Pernikahan dini menjadi sebuah momen yang dihindari dan disosialisasikan oleh pemerintah untuk tidak dilangsungkan karena akan berakibat fatal bagi anak. Karena ketika pernikahan dini dilakukan batas usia yang belum cukup dewasa, faktor finansial-ekonomi untuk menghidupi keluarga baru, dan tekanan dari luar menyebabkan mudahnya terjadi perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Rohmaniyah, 2017b). Di sisi psikis dan biologis, anak yang melakukan pernikahan dini akan lebih beresiko tinggi menghadapi kematian ibu dalam melahirkan dan bayi yang dilahirkan (Fadilah, 2021, hlm. 92). Kemudian apabila bayi tersebut lahir, maka akan terlahir secara prematur dan berada dalam keadaan kurang normal (Suryadilaga, 2009, hlm. 252).

Berbagai isu gender terjadi di atas, pada dasarnya adalah sebuah fenomena gunung es yang pada saatnya akan sampai pada titik puncaknya jika tidak mendapat penanganan yang terbaik. Kaum perempuan dan anak sebagai ikutan selalu menjadi korban dalam kekerasan. Direktur Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu Susi Handayani menyatakan bahwa tingginya isu gender yang terjadi di Provinsi Bengkulu ditenggarai oleh darurat kekerasan seksual dan tidak adanya regulasi pemulihan bagi korban. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam bentuk pemerkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, *human traficking* yang diikuti dengan kekerasan seksual, dan pemaksaan aborsi (antaranews.com, 2020). Hampir di setiap lini tindak kekerasan diikuti dengan tindakan kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu pada saat yang bersamaan dengan pandemi berada dalam posisi darurat kekerasan seksual. Isu gender yang belum menjadi perhatian serius oleh pemangku kebijakan dan penegak hukum menjadikan tingkat kekerasan dan darurat kekerasan seksual terus meningkat di Provinsi Bengkulu.

Agensi dan Resiliensi Perempuan di Tengah Krisis: dari Wacana hingga Aksi Nyata

Agensi dan aksi perempuan di Provinsi Bengkulu menghadapi kompleksitas krisis yang terjadi di tengah pandemi terlihat dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat, baik dari lembaga, organisasi, maupun masyarakat luas pada umumnya, dan dalam ranah wacana maupun aksi nyata. Dalam level wacana berbagai diskusi tentang gender telah dilakukan oleh berbagai pihak di Provinsi Bengkulu sejak jauh hari sebelum masa pandemi. Salah satu diskusi gender di Provinsi Bengkulu diselenggarakan oleh Yayasan PUPA Bengkulu (Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak) (Yayasan PUPA, 2017). Yayasan PUPA Bengkulu juga mengadakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Morecka, 2017). Diskusi ini menekankan peranan penting berbagai pihak dalam rangka menjaga harkat martabat wanita, dan mensosialisasikan Undang-Undang Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu ditekankan pentingnya pencegahan kekerasan tersebut, baik dari internal keluarga sendiri, maupun eksternal lingkungan dan pemerintah setempat. Diskusi ini menyasar pada kaum intelektual dan masyarakat yang tertarik atas isu-isu gender, mengandung edukasi sekaligus perlindungan diri terhadap kaum perempuan.

Dalam ranah wacana, berita dan laporan dari Pelayanan Cahaya Perempuan WCC mengungkap bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena perubahan pola hubungan suami isteri dalam intesitas keberadaan mereka di rumah. Karena sering bertemu di rumah, ditambah dengan himpitan ekonomi di kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah,

maka mengakibatkan terjadinya peningkatan stres dan kekerasan (Feraro, 2020). Kaum perempuan dalam hal ini isteri sekaligus ibu bagi anak-anak di suatu rumah mengalami intimidasi dan kekerasan yang luar biasa. Suami yang tidak memahami kondisi kekinian dan tersulut marah, melakukan hal-hal yang tercela dan terbilang kejahatan (Feraro, 2020). KDRT yang terjadi juga memberikan dampak psikis yang besar bagi seluruh penghuni rumah. Bahkan dampak psikis yang buruk adalah terjadi pada perempuan dan anak-anak. Keterlibatan perempuan di Provinsi Bengkulu dalam berbagai kajian yang menyuarakan aspirasi kaum perempuan menunjukkan agensi aktif para perempuan dalam membangun wacana yang berkeadilan gender.

Tidak hanya di level wacana, perempuan juga terlibat dalam gerakan kemandirian ekonomi dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Selain pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung oleh pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ragam hal lainnya, perempuan turut melakukan optimalisasi diri dalam gerakannya di tengah masa pandemi yang belum berakhir ini (antaranews.com, 2021). Dilandasi oleh serba kekurangan dan kelemahan ekonomi, kaum perempuan diwakili oleh ibu-ibu di Provinsi Bengkulu bangkit dengan adanya usaha mikro dan menengah dalam berbagai kreatifitas yang dapat dijual. Melalui kebangkitan dari sektor ekonomi ini setidaknya menjadi batu loncatan menuju kemandirian finansial di rumah tangga.

Bentuk lainnya adalah melalui organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui berbagai programnya, perempuan yang terlibat di organisasi yang ada di Provinsi Bengkulu hingga ke pelosok pedesaan ini melakukan bimbingan kepada masyarakat setempat, baik bimbingan kesehatan, pendidikan, budaya, dan bahkan pendampingan kesejahteraan keluarga (dutawarta.com, 2021). Isu keadilan gender digaungkan guna mempertegas dan meneguhkan kedudukan dan peran kaum perempuan dalam keluarga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedudukan persamaan hak dan kewajiban dalam keluarga bukan berarti sama dalam satu aspek, melainkan memiliki perbedaan sesuai dengan kodrat kemanusiaan (Ermagusti, 2011, hlm. 189–190). Keluarga ditempatkan sebagai roda penggerak kesejahteraan sosial dan basis resiliensi masyarakat.

Perempuan juga turut mengadakan gerakan pembedayaan gender di tengah masyarakat melalui program bimbingan kerohanian. Melalui penyuluh agama baik perempuan maupun laki-laki di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pedeseaan, mereka turut memperkuat isu kesetaraan gender dan pendidikan yang bernafaskan keagamaan. Mereka mengembangkan konten dan materi yang beragam dalam rangka memperkuat tugas penyuluh agama (rakyatbengkulu.com, 2020). Melalui pendekatan keagamaan, agensi, peran dan kedudukan perempuan diperteguh. Mayoritas penduduk di Provinsi Bengkulu beragama Islam oleh karena itu pendekatan islami dilakukan. Dalam konteks ini ditekankan pentingnya keberadaan seorang perempuan dalam rumah tangga. Peran berat seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, dan membesarkan anaknya turut disampaikan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini telah menunjukkan sikap proaktif menerbitkan beberapa regulasi. Regulasi tersebut ditujukan guna mendukung berbagai upaya dan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual (JDIH BPK RI, 2022). Undang-undang ini menjadi payung hukum tertiggi atas perlindungan, pencegahan, rehabilitasi korban, dan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Walau bersifat seksual, akan tetapi undang-undang tersebut sarat akan pesan kesetaraan gender yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ditambah pula dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (JDIH BPK RI, 2022). Isu kekerasan terhadap anak selalu akan berkaitan dengan isu gender, karena anak merupakan aset bangsa yang dalam kehidupan

membutuhkan kasih sayang dari perempuan. Beberapa peraturan perundangan tersebut merupakan instrumen hukum dalam menegakkan keadilan gender bagi perempuan.

Di pihak pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam membela hak-hak kaum perempuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Bank Data Perlindungan Anak, 2020). Kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Rujukan Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bengkulu (JDIH BPK RI, 2022). Pemerintah provinsi yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam rangka menegakkan keadilan gender, perlindungan, dan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak harus turut andil dalam menangani isu gender yang ada di daerah tersebut. Regulasi yang dibuat harus membawa pada perubahan pola hidup masyarakat yang heterogen dengan banyaknya penduduk. Di sisi lain, regulasi yang dikeluarkan dalam rangka mempertegas kedudukan kesetaraan gender dalam hal apapun di kehidupan.

Banyaknya gerakan, kegiatan, dan pengambilan keputusan baik secara nasional maupun lokal di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya keberpihakan dari pihak pemerintah kepada kaum perempuan. Keadaan buruk yang dialami oleh kaum perempuan harus menjadi semangat dan batu loncatan demi menapaki hidup yang lebih baik lagi. Penyuluhan, pendampingan, dan rehabilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak, baik pemerintah dan sektor swasta harus membawa dampak perubahan bagi kaum perempuan. Edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat dapat menumbuhkembangkan agensi di dalam diri perempuan. Melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukasi dan vokasional dapat menjadikan perempuan menjadi manusia yang berdaya saing tangguh dalam kodratnya, baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan dalam berbagai lini kehidupan di tengah pandemi membawa dampak besar dalam mewujudkan resiliensi kehidupan yang lebih baik. Diharapkan dengan ketangguhannya, perempuan dapat terbebas dari beban hidup dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

.

SIMPULAN

Keterlibatan aktif perempuan di Provinsi Bengkulu selama pandemi menunjukkan bahwa perempuan di daerah ini telah menunjukkan agensi aktifnya dalam membangun ketangguhan perempuan dan masyarakat. Agensi perempuan terlihat baik di ranah wacana maupun aksi nyata. Berbagai diskusi intelektual yang dilakukan di berbagai forum, penyuluhan bimbingan sosial-keagamaan yang mengedepankan isu gender mempertegas agensi para perempuan. Dalam ranah praktik, perempuan juga terlibat dalam berbagai gerakan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan sehingga dapat turut memberikan solusi nyata terhadap fenomena ketidakadilan di masyarakat. Meskipun di satu sisi perempuan turut mengalami dampak krisis yang kompleks lantaran covid-19, namun perempuan di sisi lain memiliki agensi dalam membangun resiliensi para perempuan lain dan masyarakat yang lebih luas. Pandemi telah memberikan jalan terang bagi kaum perempuan untuk semakin eksis dan memperkuat agensinya.

Kajian ini merekomendasikan perlunya memperhatikan secara lebih serius peran perempuan dan membangun hubungan gender yang adil dalam masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Bagi aparat pemerintah, baik pusat, daerah provinsi dan kabupaten kota, diperlukan pendekatan yang egaliter dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan kebijakan yang inklusif gender. Kepada pihak-pihak lain di masyarakat di Provinsi Bengkulu hendaknya menjadikan pandemi sebagai momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan baik perempuan maupun laki-laki dalam rmembangun ketangguhan menghadapi krisis. Memperkuat sektor ekonomi, kesehatan, dan

sosial merupakan tanggung jawab semua pihak demi mengatasi berbagai krisis dan ketidakadilan yang akan terjadi.

Kajian ini masih terbatas pada kajian pustaka dan belum menggali lebih dalam realitas empiris yang ada dengan segala dinamikanya yang lebih kompleks. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang melanggengkan konstruksi gender yang merugikan baik perempuan maupun laki-laki, terutama dalam situasi krisis. Kajian tentang agensi yang turut menormalisasi konstruksi gender yang memperparah krisis di masyarakat perlu dilakukan, agar dapat memberikan gambaran kemungkinan perubahan yang dapat direkayasa secara sosial.

REFERENSI

Agustin, E. F. F., & Putri, E. W. (2019). Perempuan Dalam Novel Khadijah: Ketika Rahasia Mim Tesingkap Karya Sibel Eraslan (analisis Gender Dan Agensi Perempuan). *EGALITA*, *14*(1), Article 1. https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8363

antaranews.com. (2020, September 26). *PUPA Catat 25 Kasus Kekerasan Seksual Di Bengkulu*. ANTARA News Bengkulu. https://bengkulu.antaranews.com/berita/126389/pupa-catat-25-kasus-kekerasan-seksual-di-bengkulu

antaranews.com. (2021, Januari 20). *Realisasi program PEN di Bengkulu capai Rp2.265 triliun*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/1957276/realisasi-program-pen-di-bengkulu-capai-rp2265-triliun

Badan Pusat Statistik. (2022). *Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu*. https://bengkulu.bps.go.id/indicator/23/305/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi-di-sumatera.html

Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_10/1

Bank Data Perlindungan Anak. (2020). *Perda Prov Bengkulu Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. https://bankdata.kpai.go.id/regulasi/peraturan-daerah/perda-prov-bengkulu-nomor-21-tahun-2006-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak

Dewi, E. (2020). Gender, Kepemimpinan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Situasi Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *Edisi Khusus*, 85–88. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3863.85-88

dutawarta.com. (2021). *PKK Provinsi Bengkulu*. Dutawarta.com. https://www.dutawarta.com/tags/pkk-provinsi-bengkulu

England, P. (1993). Sociological Theories and the Study of Gender. Dalam *Theory on Gender: Feminism on Theory*. ALDINE DE GRUYTER.

Ermagusti, E. (2011). Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, *1*(2), 187–196. https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.78

Evans, M. (2004). *Karl Marx*. Routledge.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, *14*(2), 88–94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590

Feraro, A. (2020, November 9). *KDRT Meningkat Selama Pandemi, Cahaya Perempuan WCC Khawatirkan Mental Anak*. EWarta.Co. https://www.ewarta.co/kdrt-meningkat-selama-pandemi-cahaya-perempuan-wcc-khawatirkan-mental-anak

Garnesia, I. (2020, Oktober 23). *Lebarnya Jurang Ketimpangan Sosial-Ekonomi Saat Pandemi COVID-19*. tirto.id. https://tirto.id/lebarnya-jurang-ketimpangan-sosial-ekonomi-saat-pandemi-covid-19-f5St

Jalil, A., & Aminah, S. (2018). Gender Dalam Persfektif Budaya Dan Bahasa. *AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, *11*(2), 278–300. https://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/659

Janz, O., & Schönpflug, D. (2014). Introduction. Dalam *Gender History in a Transnational Perspective: Networks, Biographies, Gender Orders*. Berghahn Books.

JDIH BPK RI. (2022). *PERGUB Prov. Bengkulu No. 1 Tahun 2022 tentang PEDOMAN RUJUKAN PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PROVINSI BENGKULU*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215019/pergub-prov-bengkulu-no-1-tahun-2022

JDIH BPK RI. (2022). *PERPRES No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216641/perpres-no-101-tahun-2022

JDIH BPK RI. (2022). *UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Juschka, D. M. (2005). Gender. Dalam *The Routledge Companion to the Study of Religion*. Routledge.

Karim, A. (2014). Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan). *FIKRAH*, *2*(1), Article 1. https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.550

Kompasiana.com. (2016, Mei 4). *Kasus Yuyun: Pembunuhan Berencana, Inilah yang Tak Dipahami Banyak Orang*. KOMPASIANA. https://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/5729c86fce7e61ef073b6b8a/kasus-yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang

Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.

Mahmood, S. (2015). *Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report*. Princeton University Press.

Marx, K. (1973). *Karl Marx on Society and Social Change*. University of Chicago Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.

Morecka, M. (2017, November 26). *Bersama Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pemerintah Provinsi Bengkulu. https://bengkuluprov.go.id/bersama-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan/

Nanthini, S., & Nair, T. (2020). *COVID-19 and the Impacts on Women*. S. Rajaratnam School of International Studies; JSTOR. https://doi.org/10.2307/resrep26875

Nicholson, P. (1997). Feminism and Marx: Integrating Kinship with the Economic. Dalam *The Second Wave: A Reader in Feminist Theory*. Routledge.

Nurhayati, T., & Aji, R. H. S. (2020). Emansipasi Melawan Pandemi Global: Bukti Dari Indonesia. *'ADALAH*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15468

Osland, K. M., Røysamb, M. G., & Nortvedt, J. (2020). *The impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security Agenda* (hlm. 1–5). Norwegian Institute of International Affairs (NUPI); JSTOR. https://doi.org/10.2307/resrep25732

Pilcher, J., & Whelehan, I. (2004). *50 Key Concepts in Gender Studies*. SAGE Publications.

Puspita, R. (2020, April 8). *Dampak Covid-19, Pola Kerja dari Rumah Bakal Lebih Lumrah*. REPUBLIKA.co.id. https://republika.co.id/berita/q8h10j428/dampak-covid19-pola-kerja-dari-rumah-bakal-lebih-lumrah

Rachman, A. (2020, Juli 17). *Selamat Datang di Bengkulu, Provinsi Termiskin di Sumatera Tahun 2020 | Pedoman Bengkulu*. pedomanbengkulu.com. http://pedomanbengkulu.com/2020/07/selamat-datang-di-bengkulu-provinsi-termiskin-di-sumatera-tahun-2020/

rakyatbengkulu.com. (2020, Juni 17). *Fokus Peningkatan di Tiga Sektor*. rakyatbengkulu.com. https://rakyatbengkulu.com/2020/06/17/fokus-peningkatan-di-tiga-sektor/

rakyatbengkulu.com. (2020, September 24). Provinsi Bengkulu Masuk Lima Besar Darurat Kekerasan Seksual di Sumatera. *Rakyat Bengkulu Online*. https://rakyatbengkulu.com/2020/09/24/provinsi-bengkulu-masuk-lima-besar-darurat-kekerasan-seksual-di-sumatera/

rakyatbengkulu.com. (2021, Agustus 1). Bengkulu Tiga Besar, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. *Rakyat Bengkulu Online*. https://rakyatbengkulu.com/2021/08/01/bengkulu-tiga-besar-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/

rakyatbengkulu.com. (2021, Desember 10). KDRT Meningkat Selama Pandemi. *Rakyat Bengkulu Online*. https://rakyatbengkulu.com/2021/12/10/kdrt-meningkat-selama-pandemi/

republika.co.id. (2020, Mei 10). *PUPA: Angka KDRT di Bengkulu Meningkat Selama WFH Covid-19*. Republika Online. https://republika.co.id/share/qa35mh354

rls, adn. (2020, September 24). *Provinsi Bengkulu Masuk Lima Besar Darurat Kekerasan Seksual di Sumatera*. rakyatbengkulu.com. https://rakyatbengkulu.com/2020/09/24/provinsi-bengkulu-masuk-lima-besar-darurat-kekerasan-seksual-di-sumatera/

Rohmaniyah, I. (2009). Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, *10*(2).

Rohmaniyah, I. (2017a). *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*. Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rohmaniyah, I. (2017b). Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *16*(1), 33–52. https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52

Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Penerbit Garudhawaca.

rri.co.id. (2021a, Maret 5). *Dinkes Propinsi Bengkulu dan Aktivis Perempuan Bengkulu Mengajak Masyarakat Mencegah Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/bengkulu/kesra/988027/dinkes-propinsi-bengkulu-dan-aktivis-perempuan-bengkulu-mengajak-masyarakat-mencegah-terjadinya-pernikahan-anak-dibawah-umur

rri.co.id. (2021b, Juli 24). *Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Bengkulu Meningkat*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1125249/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bengkulu-meningkat

Sarianti, B., & Hangabei, S. M. (2021). Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga. *IDEA*, *16*(41), Article 41. http://jurnal.umb.ac.id/index.php/idea/article/view/3109

SIMFONI-PPA. (2021). *SIMFONI-PPA*. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Stuurman, S. (2005). The Deconstruction of Gender:Seventeenth-Century Feminism and Modern Equality. Dalam *Women, Gender and Enlightenment*. Springer.

Sulasmi, E. (2020, Juli 3). *Cegah Kejahatan Seksual Pada Anak*. Rmolbengkulu.Com. https://www.rmolbengkulu.com/read/2020/07/03/25133/CEGAH-KEJAHATAN-SEKSUAL-PADA-ANAK-

Suryadilaga, M. A. (2009). Efek Pernikahan Dini: Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial dan Kesehatan. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *8*(2), 245–257. https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.245-257

Wirman, E. P. (2013). Al-Gindr fi Manzhur al-Islam. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, *3*(2), 173–187. https://doi.org/10.15548/jk.v3i2.51

Yayasan PUPA. (2017, Februari 3). Tentang Kami. *YAYASAN PUPA*. https://www.pupa.or.id/tentang/